

ISSN : 1411-6103

# Fajar

Jurnal LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat

EDISI : Vol. 11 No. 1, Januari 2010

## WACANA

**KEJAHATAN POLITIK (SUBVERSI) DALAM ISLAM**

Oleh : Drs. H. Abdul Malik, MM

**ETOS KERJA DALAM ISLAM**

Oleh : Prof. Dr. Moh. Matsna HS, MA

**GURU DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN DAN AL- HADITS**

Oleh : Drs. Abd. Rozak, MA

**RELASI GENDER PADA KELUARGA BURUH MIGRAN PEREMPUAN (BMP):  
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN**

Oleh : Tyas Retno Wulan, M.Si, Dr. Lala Kolopaking,  
Dr. Ekawati Sri Wahyuni, Prof. Dr. Irwan Abdullah

**TOLERANSI DAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA  
DALAM KONFIGURASI SOSIO KULTURAL LOKAL**

Oleh : Amir Fadhilah, S.Sos. M.Si

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN  
DENGAN PEMANFAATAN KOMPOR BIJI JARAK**

Oleh : Dr. Ir. Elpawati, MP

**KEBUDAYAAN KEMISKINAN : SUATU PANDANGAN ANTROPOLOGI**

Oleh : Wati Njamsari, S.Sos. M.Si

**METODOLOGI PENDIDIKAN ISLAM MENURUT IBN KHALDUN**

Oleh : Saifudin, S.Ag. M.Pd

**TATA NEGARA ISLAM MENURUT TAQIYUDDIN AN NABHANI**

Oleh : Drs. H. Fand Hadjry, MM

# RELASI GENDER PADA KELUARGA BURUH MIGRAN PEREMPUAN (BMP): ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Oleh : Tyas Retno Wulan<sup>1</sup>,  
Lala Kolopaking, Ekawati Sri Wahyuni<sup>2</sup>, Irwan Abdullah<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Migrasi internasional yang dilakukan para perempuan adalah salah satu upaya untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Kepergian perempuan untuk jangka waktu yang lama dapat memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan fungsi keluarga. Pada titik inilah tulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran sejauhmanakah kepergian Buruh migran perempuan (BMP) memberikan dampak terhadap keluarga. Secara lebih detail, kajian ini ingin menyoroti apakah BMP mampu merubah relasi gender dalam keluarga. Dalam konteks relasi gender dalam keluarga, nampak bahwa teori konflik yang menekankan penguasaan sumberdaya untuk melakukan relasi yang equal tidak sepenuhnya berlaku. Relasi gender dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kebudayaan, etnik, tingkat pendidikan, agama dan kelas sosial ekonomi. Peningkatan pendapatan istri yang menjadi BMP ternyata tidak berimplikasi dan merefleksikan relasi gender yang setara, artinya seberapa besarpun kontribusi perempuan dalam membantu mencari nafkah (atau bahkan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga), karena setting masyarakat Indonesia yang patriarkhis pada akhirnya tidak memberikan perubahan nilai yang signifikan terhadap kedudukan dan *bargaining position* perempuan dalam masyarakat. Pada titik inilah kajian kritis terhadap teori konflik dalam keluarga menjadi urgen dilakukan.

**Kata kunci:** Migrasi internasional, BMP, relasi gender, teori konflik

### A. Pendahuluan

Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi utama dalam kehidupan seseorang, melalui keluarga seseorang tumbuh dan berkembang serta mendapatkan penanaman norma-norma agar bisa hidup secara normal seperti masyarakat di lingkungan sekitarnya. Melalui keluarga pula seseorang bisa saling mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anggota keluarga yang lain. Secara khusus, Wilson (1985) menjelaskan bahwa para Sosiolog tertarik akan permasalahan keluarga disebabkan dua alasan utama, yaitu *pertama*, sebagai individu, kita adalah anggota kelompok/keluarga.

<sup>1</sup> Staf Pengajar FISIP UNSOED Purwokerto

<sup>2</sup> Staf Pengajar FEMA IPB

<sup>3</sup> Staf Pengajar FIB UGM

Kelahiran memberi masing-masing dari kita satu set hubungan darah dengan siapa kita bersama-sama berkembang selama bertahun-tahun. Perkawinan membawa kita pada suatu hubungan baru yang berkaitan dengan keluarga. Hubungan seperti itu mungkin baru berakhir karena kematian, perceraian, atau jarak. *Kedua*, oleh karena peranan sentral keluarga dalam kehidupan sosial. Para pendiri sosiologi, seperti Durkheim dan Marx, sangat tertarik akan masalah sosial pada proses revolusi industri yang mengubah masyarakat di abad ke-19. Industri, pertanian dan revolusi keilmuan menghasilkan perubahan kebijaksanaan dan ekonomi yang mengancam atau mampu menciptakan kekacauan sosial di Eropa. Keluarga dilihat sebagai salah satu institusi yang harus lebih dulu bereaksi terhadap perubahan ini. Artinya walaupun secara historis, keluarga merupakan kelompok sosial yang eksis pertama kali sebelum ada lembaga sosial yang lain, namun setiap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, pasti akan berdampak pada formasi dan kompleksitas persoalan yang dihadapi keluarga dalam masyarakat tersebut, demikian juga sebaliknya.

Goode (1985) menjelaskan bahwa keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat, artinya ada pola interaksi dan interdependensi antara keduanya. Sebagai sub sistem sosial, keluarga memiliki kedudukan yang strategis untuk menjalankan dan mempertahankan fungsi masyarakat dan penghubung pada struktur sosial yang lebih luas. Jadi dalam konteks kehidupan sosial, keluarga memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang penting dan signifikan. Pada titik inilah, kajian keluarga menjadi titik krusial secara sosiologis.

Walaupun banyak sosiolog menyadari betul signifikansi keluarga dalam kehidupan masyarakat, upaya-upaya untuk mengkaji persoalan keluarga secara kritis yang dibingkai dalam analisa teoritis secara komprehensif, masih relatif jarang dilakukan. Dalam tradisi Sosiologi Pedesaan (SPD) IPB misalnya, berdasarkan penelusuran terhadap tesis dan disertasi 30 tahun SPD, kajian keluarga termasuk tema yang jarang diulas secara kritis, dan cenderung menggunakan *teoritical framework* yang seragam, yaitu struktural fungsional. Hal ini juga sesuai dengan pijakan teori yang mendominasi tema keluarga yaitu teori dari M.J Levy. Jr yang tertuang dalam bukunya "*The Family Revolution in Modern China*: yang menunjuk pada pentingnya 5 macam substruktur demi kelangsungan sistem yaitu differensiasi peranan, alokasi ekonomi, alokasi solidaritas, alokasi kekuasaan serta alokasi

integrasi atau ekspresi (Sayogyo, 1985). Tidak ada yang salah dengan "homogenitas" teori dalam melihat persoalan keluarga, namun hal itu akan menghambat perkembangan kajian keluarga, apalagi dalam konteks masyarakat global saat ini, dimana terkadang eksistensi keluarga pun mulai dipertanyakan. Pada titik ini kajian teoritis secara komprehensif terhadap persoalan keluarga menjadi mutlak diperlukan.

Salah satu persoalan yang dihadapi keluarga dalam masyarakat global saat ini adalah migrasi internasional yang dilakukan salah satu anggota keluarga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, khususnya yang dilakukan oleh perempuan. Migrasi internasional merupakan fenomena yang telah mendunia. Pada tahun 1990-an diperkirakan 120 juta penduduk tinggal di luar negara tempat kelahiran mereka (McFalls dalam Wiyono, 2003). Data yang tidak jauh berbeda ditunjukkan oleh Bank Dunia (2006) dan Setiadi (2004), yang mencatat bahwa pada dua dasawarsa terakhir, kuantitas serta ruang lingkup migrasi tenaga kerja antarnegara meningkat dengan pesat, dan diestimasikan bahwa sebanyak 125 juta orang tinggal dan bekerja di luar negara aslinya. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia. Berkurangnya kesempatan kerja dan banyaknya pengangguran selama krisis ekonomi telah mendorong banyak pekerja Indonesia yang mencari kerja di luar negeri. Fenomena tersebut semakin memperkuat kecenderungan meningkatnya jumlah mobilitas atau pengiriman buruh migran Indonesia (BMI) ke luar negeri yang diakibatkan oleh faktor dinamika masyarakat, peningkatan pendidikan, aspirasi dan pendapatan.

Seiring dengan perkembangan migrasi tersebut di atas, secara global tampak bahwa fenomena migrasi perempuan diindikasikan semakin mendominasi perkembangan tersebut. Castle dan Miller seperti yang dikutip oleh Setiadi (2004) dan Bank Dunia (2006) menjelaskan bahwa proses feminisasi migrasi tersebut merupakan suatu proses global seiring dengan globalisasi ekonomi. Dalam dua dekade terakhir, terjadi pergeseran perilaku dan kecenderungan migrasi, yakni semakin dominannya perempuan dalam proses migrasi internasional (Guest, 2003; Martin, 2003). Kecenderungan ini juga terjadi di Indonesia. Bila dicermati proporsi penempatan buruh migran perempuan (selanjutnya disebut BMP)<sup>4</sup> dan laki-laki di berbagai kawasan,

---

<sup>4</sup> Penulis cenderung memilih istilah ini dibanding istilah TKW yang lazim digunakan dengan pertimbangan bahwa istilah ini lebih netral dan tidak bias gender. Dalam berbagai literatur, buruh migran perempuan dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia Wanita (TKIW) ada juga yang menggunakan

maka penempatan BMP masih mendominasi angka penempatan BMI, kecuali untuk kawasan Amerika dan Eropa. Data tahun 1995 menunjukkan bahwa dari 120.603 orang pekerja migran ke luar negeri 67,5 persennya adalah perempuan, tahun 1996 dari 220.162 orang buruh migran 82,1 persennya adalah perempuan, dan tahun 1997 tercatat 54,9 persen dari 502.997 buruh migran adalah perempuan. Data terbaru dari penempatan TKI tahun 2001-2004, TKI perempuan mencapai 1.113.988 orang atau 76,82 persen dari seluruh jumlah penempatan TKI yaitu 1.450.069 orang. Dari seluruh penempatan TKI perempuan terbanyak bekerja di kawasan Timur Tengah terutama negara Saudi Arabia sebanyak 63,14 persen, menyusul di kawasan Asia pasifik sebesar 36,83 persen dan sisanya di kawasan Amerika dan Eropa sebesar 0,27 persen (Dirjen PPTKLN Depnakertrans RI, 2005).

Dampak dari migrasi internasional buruh migran perempuan sangat kompleks. Dampak positifnya antara lain bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang implikasinya selain menambah pendapatan rumah tangga buruh migran tersebut, secara makro juga menjadi aset bagi devisa negara. Namun dampak negatifnya juga sangat kompleks, mulai dari banyaknya kasus kekerasan, penyiksaan, pemerasan dan pelecehan seksual yang dialami para BMP di luar negeri atau selama di dalam negeri (sebelum keberangkatan), rentannya BMP untuk diperdagangkan (*trafficking*), sampai dengan kepulauan BMP yang rawan pemerasan, apalagi Menurut Masduki (1998:45) jenis pekerjaan yang banyak tersedia untuk buruh migran perempuan adalah pembantu rumah tangga yang masuk dalam wilayah 3D (*Dirty, dangerous and difficult*). Kematian Siti Maemunah, BMP asal Sukabumi Jawa Barat karena serangan brutal Israel ke Libanon 13 Juli 2006 menjadi salah satu bukti pahit resiko yang harus dihadapi BMP (Kompas, 29 Juli 2006). Dampak menjadi BMP yang cukup signifikan adalah pengaruhnya terhadap keluarga, karena kepergian BMP khususnya yang berstatus istri dapat mengakibatkan terganggunya fungsi-fungsi keluarga. Kepergian istri untuk jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya perubahan

---

istilah Tenaga Kerja Wanita (TKW). Istilah ini sekaligus membedakan dengan istilah tenaga kerja laki-laki yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun sesungguhnya perbedaan istilah tersebut pada satu sisi dianggap bias gender karena dalam berbagai peraturan perundangan yang menggunakan istilah TKI, secara inklusif digunakan untuk menyebut tenaga kerja perempuan. Selain itu dikalangan aktivis perempuan, istilah Perempuan dianggap lebih mengagungkan harkat martabat perempuan karena berasal dari empuan artinya perempuan yang diempukan, yang punya otonomi. Sementara 'wanita' sering diartikan sebagai 'wani ditata'. Lebih lengkap bisa dilihat di Jurnal Perempuan, Nomor 02 Desember-Januari 1997.

struktur keluarga. Blood (1972) menyebutkan beberapa akibat yang timbul dari migrasi terhadap keluarga antara lain berkurangnya intensitas komunikasi, melemahnya jaringan atau ikatan kekerabatan, mengurangi stabilitas keluarga serta melonggarkan keterikatan moral terhadap budaya di tempat asal.

## B. Tujuan Penulisan

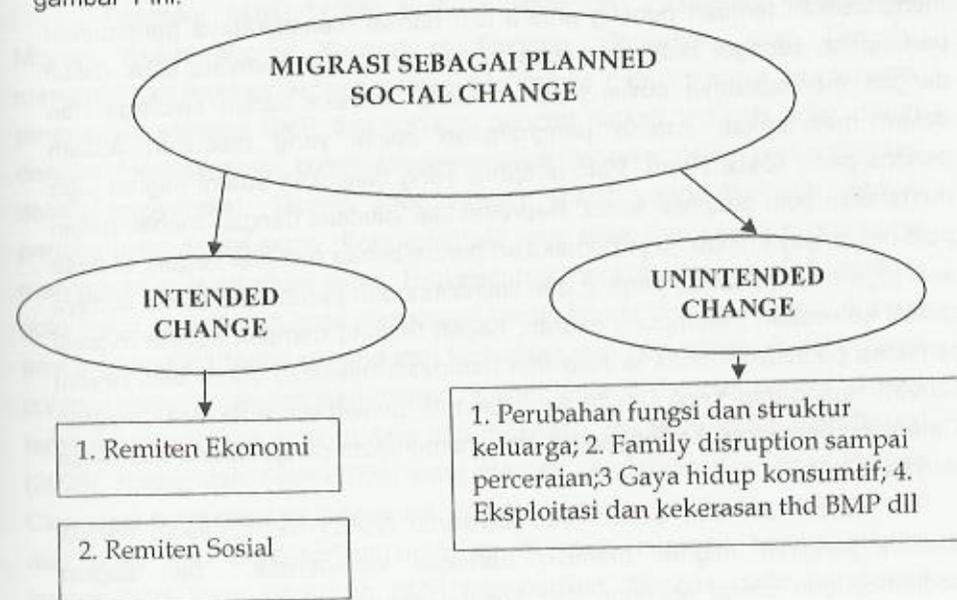
Berdasarkan deskripsi di atas, tersebut tampak bahwa migrasi internasional dapat memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan fungsi keluarga. Pada titik inilah kajian ini berusaha untuk memberikan gambaran sejauhmanakah kepergian BMP memberikan dampak terhadap keluarga. Secara lebih detil, kajian ini ingin menyoroti apakah BMP mampu merubah relasi gender dalam keluarga?. Untuk itu tulisan ini mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah migrasi dalam rangka pencarian nafkah yang dilakukan kaum perempuan tersebut akan dapat mengubah posisi mereka menjadi lebih baik?,
2. Apakah relasi gender antara laki-laki atau suami dan perempuan atau istri akan menjadi lebih setara?
3. Apakah dengan melakukan migrasi perempuan dapat lebih banyak berperan sebagai pengambil keputusan untuk hal-hal yang cukup strategis ?

## C. Migrasi dan Dampaknya terhadap Keluarga

Secara sosiologis, migrasi merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan sosial. Menurut Blood (1972), migrasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan dalam keluarga. Dalam kondisi yang normal (bukan karena proses bencana alam, perang ataupun konflik), migrasi bisa dikategorikan sebagai perubahan yang direncanakan (*planned social change*). Namun sering kali dalam proses migrasi yang telah direncanakan tersebut akan terjadi perubahan yang diharapkan (*intended change*) dan perubahan yang tidak diharapkan (*unintended change*). *Intended change* dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai dampak positif proses migrasi sedangkan *unintended change* bisa dianggap sebagai dampak sosial (*social cost*) migrasi. Cara pandang tentang migrasi ini, pada akhirnya berimplikasi pada penelitian-penelitian yang dihasilkan tentang migrasi. Dalam

konteks keluarga, *unintended change* ini seringkali yang sering dibahas. Secara singkat, pola berpikir tentang dampak migrasi dapat dilihat dalam gambar 1 ini.



Beberapa kajian yang melihat *unintended change* migrasi terhadap keluarga antara lain dapat dilihat dari beberapa penelitian sebagai berikut: Penelitian Setiadi (1999) yang mengkaji dampak non ekonomi dan non demografi keberadaan migrasi internasional. Penelitian tersebut menunjukkan telah terjadi transformasi sosial budaya yang membawa konsekuensi terjadinya pergeseran perspektif migran, khususnya yang menyangkut peranan sosial yang ada dalam masyarakat. Pergeseran ini dapat dilihat misalnya dari keterlibatan perempuan yang secara intensif dalam kegiatan publik (kemasyarakatan), pergeseran hubungan antargenerasi dan pengalihan fungsi sosial keluarga, serta perubahan norma masyarakat. Penelitian Wahyuni di sebuah desa di Jawa Tengah dan Bandung memperlihatkan strategi ekonomi perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dan terbaginya keluarga inti menjadi dua atau lebih rumahtangga. Penelitian ini juga menunjukkan adanya persoalan bagi anak-anak yang ditinggal ibunya di desa serta kesejahteraan para lansia (Wahyuni, 2000).

Disertasi Astuti (2005) berjudul *Redefinisi Eksistensi Perempuan Migran: Kasus Migran Kembali di Godong, Grobogan Jawa Tengah*, menghasilkan temuan penting antara lain bahwa meningkatnya pendapatan perempuan sebagai BMP dan sebagai pencari nafkah ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya posisi tawar-menawar mereka dalam keluarga dan dalam masyarakat, karena penghargaan sosial yang diberikan adalah penghargaan sosial semu. Pola adaptasi yang dilakukan suami migran juga merupakan pola adaptasi semu. Representasi identitas dengan menampilkan pola hidup, gaya hidup, juga pemakaian benda-benda dari luar negeri, di desa asal juga menjadi tanda penting dari liminalitas dan perubahan sosial budaya dalam kehidupan perempuan migran. Kajian tentang dampak negatif migrasi terhadap pendidikan anak di Asia dan Indonesia misalnya diteliti oleh Bryant (2005), Huang dan Yeoh (2005) yang meneliti pendidikan anak-anak imigran Cina yang bermigrasi ke Singapura, dan memerlukan pengorbanan luar biasa dari sang Ibu.

Kajian lain dari Setiadi dan Dwiyanto (2002) menunjukkan bahwa daerah pengirim migran memiliki berbagai karakteristik dan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan kultural yang berbeda dengan daerah bukan pengirim migran. Secara ekonomis, daerah pengirim migran memiliki tingkat kemajuan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Secara demografis, wilayah pengirim migran memiliki karakteristik tingginya kesenjangan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan sehingga memunculkan permasalahan sosial tertentu. Secara sosial dan budaya, daerah pengirim migran memiliki ciri lebih permisif terhadap berbagai penyimpangan dan memiliki tingkat perceraian yang tinggi.

Kajian tentang perubahan fungsi dan struktur keluarga yang berdampak pada meningkatnya angka perceraian di kalangan keluarga dan masyarakat asal migran, dianggap sebagai dampak negatif lain dari migrasi internasional (Mantra, 1998; Tamtari 1999; 2000; Sukamdi 2001; Kustini 2002). Dari beberapa studi tersebut tampak bahwa ternyata fenomena *family disruption* di kalangan keluarga migran merupakan ciri *social cost* proses migrasi internasional. Namun terkadang dampak negatif ini dari migrasi internasional BMP ini sangat bias gender, penelitian Kustini (2002) misalnya menemukan bahwa jika terjadi perceraian dalam keluarga BMP, maka masyarakat akan memandang sebagai akibat negatif yang harus ditanggung

BMP. Namun terkadang dampak negatif ini dari migrasi internasional BMP ini sangat bias gender.

Disertasi Astuti (2005) berjudul *Redefinisi Eksistensi Perempuan Migran: Kasus Migran Kembali di Godong, Grobogan Jawa Tengah*, menghasilkan temuan penting antara lain bahwa meningkatnya pendapatan perempuan sebagai BMP dan sebagai pencari nafkah ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya posisi tawar-menawar mereka dalam keluarga dan dalam masyarakat, karena penghargaan sosial yang diberikan adalah penghargaan sosial semu. Pola adaptasi yang dilakukan suami migran juga merupakan pola adaptasi semu. Representasi identitas dengan menampilkan pola hidup, gaya hidup, juga pemakaian benda-benda dari luar negeri, di desa asal juga mejadi tanda penting dari liminalitas dan perubahan sosial budaya dalam kehidupan perempuan migran. Kajian tentang dampak negatif migrasi terhadap pendidikan anak di Asia dan Indonesia misalnya diteliti oleh Bryant (2005), Huang dan Yeoh (2005) yang meneliti pendidikan anak-anak imigran Cina yang bermigrasi ke Singapura, dan memerlukan pengorbanan luar biasa dari sang Ibu. Berdasarkan deskripsi di atas, nampak bahwa migrasi internasional yang dilakukan BMP memberikan dampak pada perubahan fungsi dan struktur keluarga. Kajian pada sub bab dibawah ini secara lebih khusus menyoroiti persoalan tentang relasi gender pada keluarga BMP.

#### **D. Relasi Gender pada keluarga BMP: Antara Harapan dan Kenyataan**

Apakah meningkatnya penghasilan perempuan/istri yang menjadi BMP otomatis akan merubah relasi gender terhadap laki-laki/suami?. Nampaknya persoalan ini harus ditinjau secara lebih kritis. Sementara itu sumberdaya juga merupakan konsep yang sangat penting dari teori konflik. Marx dan Engels memandang sumberdaya menjadi dasar bagi "kontrol yang berarti dari produksi". Mereka memfokuskan pada ekonomi material yang memberi keuntungan terbatas pada sebagian besar teoritis konflik masa kini. Dalam konteks ini terdapat perdebatan mengenai hubungan antara kekuasaan, sumberdaya dan otoritas. Negosiasi adalah satu teknik utama yang digunakan dalam keluarga untuk mengelola konflik. Dalam konteks keluarga negosiasi terjadi ketika ada tujuan dari satu pihak anggota keluarga yang menggunakan sumberdaya untuk mempengaruhi pihak anggota keluarga lainnya untuk bergerak pada tujuan bersama. Sedangkan konsep konsensus berarti kesepakatan. Konsensus dicapai ketika terjadi kesepakatan

dalam negosiasi, jadi konsensus merupakan *outcome* dari negosiasi. Jika mendasarkan pada teori Marxist, secara otomatis ketika BMP memperoleh penghasilan sendiri, otomatis bisa menaikkan *bargaining position* dalam keluarga. Namun apakah demikian?

Temuan Kustini (2002) menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Barat, Sukabumi memiliki angka cerai gugat (cerai atas keinginan istri) sangat tinggi dibandingkan dengan cerai talak (cerai atas keinginan suami). Sebagai ilustrasi selama tiga tahun terakhir dari 967 perceraian, 748 (77%) adalah cerai gugat. Kondisi ini berbeda dengan perceraian yang terjadi di kabupaten Indramayu. Selama tiga tahun terakhir di Indramayu terdapat 13.260 peristiwa perceraian. Sebanyak 10.134 (76%) perceraian tersebut diajukan oleh laki-laki (cerai talak). Demikian juga secara rata-rata angka perceraian di Jawa Barat didominasi oleh cerai talak. Hal ini yang kemudian menarik perhatian Kustini untuk mengkaji hubungan antara cerai gugat dan karakteristik Sukabumi sebagai pengirim BMP.

Berdasarkan terminologi bahasa setempat, ada tipologi perceraian yang dikenal di desa Kadupura yaitu *talak bikeneun*, *talak padukeunen* dan *talak jualen* (lihat tabel 1).

Tabel 1. Tipologi Perceraian di kalangan BMP

Tipologi Perceraian di kalangan BMP		
<p><b>BIKENEUN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dijatuhkan oleh suami baik dgn jelás maupun dgn sindiran</li> <li>■ Terjadi baik langsung maupun melalui perantara (surat, telepon dll)</li> <li>■ Tidak ada ruang bagi istri untuk menolak</li> <li>■ Tanpa saksi atau dgn saksi (ortu, kerabat, elit desa)</li> <li>■ Tidak ada surat cerai yg sah secara hukum</li> <li>■ Biaya murah dan proses cepat</li> </ul>	<p><b>PADUKENEUN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diajukan oleh suami (cerai talak) atau oleh istri (cerai gugat) baik lisan maupun tertulis</li> <li>■ Proses cerai dilakukan melalui persidangan di Pengadilan Agama</li> <li>■ Terjadi stlh tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan</li> <li>■ Ada surat keterangan cerai dari PA</li> <li>■ Biaya mahal dan waktu lama (berbulan-bulan)</li> <li>■ Proses rumit karena beberapa kali sidang</li> </ul>	<p><b>JUALEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diajukan secara tertulis atau lisan oleh istri terhadap suami</li> <li>■ Diberikan oleh suami setelah istri memenuhi persyaratan tertentu (uang, pengembalian mas kawin dll)</li> <li>■ Tanpa saksi atau dengan saksi (orang tua, kerabat, elit desa)</li> <li>■ Tidak ada surat cerai yg sah secara hukum</li> <li>■ Biaya murah dan proses cepat</li> </ul>

Sumber: Kustini (2002)

Kasus-kasus perceraian BMP pada umumnya merupakan modifikasi dan sekaligus menunjukkan adanya pergeseran makna cerai dari BMP. Pergeseran tersebut adalah sebagai berikut, pada *talak bikeneun*, walaupun BMP tidak punya posisi untuk menolak perceraian, tetapi ia memiliki kesiapan mental untuk hidup di luar perkawinan. Penguatan posisi ekonomi perempuan merupakan dasar utama kesiapan tersebut. Pada *talak padukeuneun* pergeseran secara nyata terlihat dari dominannya cerai gugat dibanding cerai talak. Sedangkan *talak jualeun* merupakan fenomena yang relatif baru setelah adanya BMP sekaligus menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman cerai sebagai hak penuh suami. Secara lengkap, pergeseran makna perceraian di kalangan BMP dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pergeseran Makna Perceraian di kalangan BMP

No.	MAKNA CERAI KONVENSIONAL	ADA PERGESERAN ATAU TIDAK
I.	Perceraian merupakan masalah pribadi sehingga campur tangan pemerintah dianggap tidak relevan. Oleh karena itu perceraian tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama tetapi cukup diselesaikan secara kekeluargaan atau melibatkan elit desa sebagai saksi.	Tidak ada pergeseran. Legitimasi perceraian melalui norma agama dianggap lebih penting ketimbang legitimasi hukum formal dalam hal ini Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa alasan tidak bercerai melalui Pengadilan Agama adalah: (1) tidak ada sanksi sosial bagi perceraian di desa. (2) perceraian dianggap telah sah jika dilakukan sesuai dengan aturan agama. (3) alasan praktis ingin cepat, mudah dan murah.
II.	TALAK BIKEUNEUN	Tidak ada pergeseran. BMP meyakini bahwa berdasarkan norma agama, cerai merupakan hak penuh yang dimiliki suami.
1.	Istri tidak punya posisi tawar untuk ikut memutuskan perceraian.	
2.	Bercerai merupakan hal yang sangat ditakuti karena berarti hilangnya nafkah yang selama ini diperoleh dari suami.	Ada pergeseran. Walaupun BMP enggan untuk bercerai, tetapi ketika cerai terjadi ternyata ia lebih siap menghadapi hidup pasca perceraian. Kemandirian BMP di bidang ekonomi sekaligus menimbulkan

No.	MAKNA CERAI KONVENSIONAL	ADA PERGESERAN ATAU TIDAK
		kemandirian secara psikologis karena ia tidak lagi dihindangi rasa khawatir menghadapi masa depannya.
3.	Tidak ada ketentuan yang jelas tentang pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Semuanya sangat tergantung pada hasil musyawarah keluarga.	Tidak ada pergeseran. Suami dianggap sebagai pencari nafkah utama. Harta yang diperoleh istri selama menjadi BMP dicatat atau diakui atas nama suami atau atas nama anaknya. Hal ini terjadi karena seberapa besarpun hasil kerja istri hanya dianggap sebagai penghasilan tambahan.
III. 1.	TALAK PADUKEUNEUN  Cerai talak (talak atas keinginan suami) lebih mendominasi dibandingkan dengan cerai gugat (talak atas keinginan istri). Hal ini terjadi karena cerai dianggap hak suami.	Pergeseran yang terjadi adalah: cerai gugat lebih mendominasi dibandingkan cerai talak. Makna cerai tidak lagi dianggap sebagai hak yang dimiliki suami. Sebagian perempuan di Sukabumi memaknai perceraian sebagai sesuatu yang mungkin dilakukan atau diajukan oleh istri. Kemandirian perempuan yang salah satunya merupakan akibat langsung dari keberadaannya sebagai BMP menjadi pendorong sehingga istri memiliki kekuatan untuk menentukan yang terbaik bagi kehidupan perkawinannya antara lain melalui perceraian
IV.	TALAK JUALEUN  Talak Jualeun merupakan hal yang jarang terjadi. Hal ini bisa dimaklumi karena sebelumnya istri secara ekonomi sangat tergantung pada suami. Bercerai dianggap sebagai hilangnya sumber	Ada pergeseran dari talak atas keinginan suami menjadi talak atas keinginan istri. Keputusan perempuan untuk menjadi BMP sekaligus menunjukkan kemandiriannya untuk memilih jalan yang terbaik bagi masa depannya. Ia berani untuk meminta cerai walaupun untuk keberaniannya itu, dia harus menyediakan sejumlah uang. Tipologi talak jualeun mungkin saat ini dianggap sebagai suatu penyimpangan. Namun tidak

No.	MAKNA CERAI KONVENSIONAL	ADA PERGESERAN ATAU TIDAK
	nafkah kehidupan yang selama ini dipenuhi suami.	menutup kemungkinan jika kemudian berubah atau bergeser menjadi pola umum selama masih terdapat BMP. Kecenderungan tersebut saat ini bisa dibuktikan di kabupaten Sukabumi. Perceraian di kabupaten ini menunjukkan dominannya pihak istri (cerai gugat).

Sumber: Kustini (2002)

Kajian Kustini terhadap perceraian di kalangan BMP menunjukkan bahwa meskipun kepergian sebagian besar buruh migran perempuan di Kadupura sangat ditentukan oleh keputusan keluarga, baik keluarga inti atau *nuclear family* ataupun keluarga luas (*extended family*). Jikapun keputusan untuk pergi tidak merupakan keputusan keluarga, misalnya karena suami tidak menyetujui, motivasi untuk pergi selalu terkait dengan kepentingan keluarga, bukan kepentingan individu perempuan semata. Namun demikian tidak berarti bahwa tanggapan positif selalu mewarnai kehidupan pribadi maupun keluarga buruh migran perempuan. Dalam berbagai kasus konflik keluarga seringkali pihak perempuan dianggap memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan dengan laki-laki atau suaminya (Kustini, 2002).

Penelitian Kustini (2002) misalnya menemukan bahwa jika terjadi perceraian dalam keluarga BMP, maka masyarakat akan memandang sebagai akibat negatif yang harus ditanggung BMP. Dalam hal ini elit desa juga bersikap mendua karena di satu sisi mengecam perceraian sebagai suatu dosa yang harus ditanggung BMP, tetapi sekaligus membuka jalan bagi terjadinya perceraian. Kecaman tersebut sekaligus menunjukkan bahwa konstruksi sosial tentang perempuan yang baik adalah yang tidak menjadi BMP. Kehadiran dan peran istri di rumah merupakan prasyarat utama untuk menciptakan kebahagiaan keluarga. Seberapa besarpun kontribusi BMP dalam meningkatkan ekonomi keluarga hanya dianggap "membantu" suami dan kepergiannya tetap merupakan suatu pembangkangan terhadap suami. Label istri idaman hanya ditujukan kepada istri yang selalu di rumah, meladeni suami serta merawat anak. Padahal tidak jarang perceraian dalam keluarga BMP terjadi karena suami menggunakan hasil kerja istrinya untuk

berfoya-foya atau menikah lagi. Namun lagi-lagi pihak BMP yang dijadikan kambing hitam. Anggapan bahwa menjadi BMP akan merubah posisi tawar perempuan dalam relasi gender ternyata juga tidak sepenuhnya berlaku.

Disertasi Astuti (2005) berjudul Redefinisi Eksistensi Perempuan Migran: Kasus Migran Kembali di Godong, Grobogan Jawa Tengah, menghasilkan temuan penting antara lain bahwa meningkatnya pendapatan perempuan sebagai BMP dan sebagai pencari nafkah ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya posisi tawar-menawar mereka dalam keluarga dan dalam masyarakat, karena penghargaan sosial yang diberikan adalah penghargaan sosial semu. Walaupun kepergian perempuan bisa dikatakan sebagai "gerakan tandingan" terhadap peran dan kedudukan perempuan dan sebagai suatu tanda adanya proses dekonstruksi terhadap realitas sosial yang berlaku, namun Astuti menyimpulkan bahwa dari sisi kepentingan perempuan, migrasi tidak sungguh-sungguh memberdayakan perempuan. Pola adaptasi yang dilakukan suami ketika istri tidak ada di rumah hanyalah pola adaptasi semu. Dengan kata lain, ketika istri kembali ke rumah, para suami kembali ke posisi semula sebagai orang yang merasa tidak pantas untuk melakukan pekerjaan yang dilekatkan sebagai pekerjaan domestik. Secara konseptual analisis gender merupakan analisis yang lebih menitik beratkan perhatiannya pada hubungan (struktur) gender. Gender sebagai konstruksi sosial yang telah disosialisasikan sejak lahir ternyata telah menyumbangkan *inequalities* dalam kehidupan bersama keluarga bahkan masyarakat luas. *Inequalities* yang paling awal justru tercermin dalam pembagian kerja dalam keluarga.

Yuarsi (2002) menjelaskan bahwa dukungan suami yang diberikan pada istri yang mempunyai minat untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja setidaknya dilandasi dua hal yaitu, pertama adanya kesadaran di pihak suami bahwa perempuan mempunyai hak yang sama untuk melakukan aktivitas mereka, kedua adanya kecenderungan untuk meletakkan beban dan tanggungjawab ekonomi ke pihak istri. Data dari kajian PSKK UGM tahun 2001 terhadap para mantan BMP yang berasal dari kecamatan di DIY juga memperlihatkan bahwa pembagian kerja yang seimbang belum terjadi. Suami pada awalnya sanggup untuk mengambil alih tugas-tugas istri selama istri bekerja di luar negeri, namun pada kenyataannya pengambilalihan tugas itu tidak terjadi. Suami yang ditinggal istri untuk bekerja ke luar negeri cenderung untuk meminta tolong kepada keluarga istri untuk mengerjakan berbagai tugas rumah tangga. Hal semacam itu menunjukkan masih kuatnya bias gender di

kalangan laki-laki. Ketidakrelaan suami untuk ikut meringankan beban istri makin tampak dengan munculnya kasus "penyelewengan" dan perilaku "jajan" yang dilakukan suami. Hal ini jelas tidak menunjukkan rasa empati yang dilakukan suami. Pada titik inilah nampak bahwa secara umum budaya patriarkhi masih mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat semacam ini perempuan dianggap sebagai subordinat laki-laki.

Kajian Daulay (2001) menunjukkan bahwa ada kecenderungan telah terjadi pergeseran pola relasi antara suami-istri pada keluarga buruh migran di Krawang. Hubungan gender yang selama ini terjadi di dalam keluarga BMP selama ini masih didominasi oleh sistem patriarkhi, suami mendominasi sebagai pemegang kekuasaan pada berbagai aspek. Fenomena BMP yang terjadi pada awal tahun 80-an sedikit banyak telah merubah pola hubungan yang patriarkhi selama ini. Nilai patriarkhi yang sarat dengan nilai-nilai pemingitan dalam konteks BMP ternyata telah mengalami perubahan. Namun jika dikritisi lebih jauh, kajian Daulay ini juga menegaskan bahwa aset ekonomi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika tidak dibarengi dengan peningkatan pengetahuan yang memadai. Lebih jauh, Rajab (2006) yang mengkritisi tulisan Daulay menjelaskan bahwa kajian Daulay tidak meletakkan masalah kemiskinan sebagai faktor yang dominan dalam fenomena yang diteliti. Karena pola relasi gender sejauhmana itu timpang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kebudayaan, etnik, tingkat pendidikan, agama dan kelas sosial ekonomi. Dengan kata lain, bahwa pencarian nafkah yang dilakukan perempuan-perempuan miskin bukan merupakan pantulan atau refleksi dari perubahan ideologi patriarkhi patriarkhi dan memudarnya ketimpangan gender. Pada titik inilah kajian yang melihat bahwa mobilitas BMP yang diikuti kenaikan pendapatan akan serta merta merubah relasi gender dan *bargaining positionnya* nampaknya harus dikritisi lebih jauh.

Memang, secara konseptual sumberdaya merupakan konsep yang sangat penting dari teori konflik. Marx dan Engels memandang sumberdaya menjadi dasar bagi "kontrol alat produksi" dan mereka memfokuskan pada ekonomi material. Dalam konteks ini terdapat perdebatan mengenai hubungan antara kekuasaan, sumberdaya dan otoritas. Selain sumberdaya konsep lain yang penting dari teori konflik adalah struktur, negosiasi (siapa mendapatkan apa dengan modal sumberdaya yang dimilikinya) dan konsensus (*outcome* negosiasi) (Klein & White, 1996). Namun dari berbagai kajian di atas,

kalangan laki-laki. Ketidakrelaan suami untuk ikut meringankan beban istri makin tampak dengan munculnya kasus "penyelewengan" dan perilaku "jajan" yang dilakukan suami. Hal ini jelas tidak menunjukkan rasa empati yang dilakukan suami. Pada titik inilah nampak bahwa secara umum budaya patriarkhi masih mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat semacam ini perempuan dianggap sebagai subordinat laki-laki.

Kajian Daulay (2001) menunjukkan bahwa ada kecenderungan telah terjadi pergeseran pola relasi antara suami-istri pada keluarga buruh migran di Krawang. Hubungan gender yang selama ini terjadi di dalam keluarga BMP selama ini masih didominasi oleh sistem patriarkhi, suami mendominasi sebagai pemegang kekuasaan pada berbagai aspek. Fenomena BMP yang terjadi pada awal tahun 80-an sedikit banyak telah merubah pola hubungan yang patriarkhi selama ini. Nilai patriarkhi yang sarat dengan nilai-nilai pemingitan dalam konteks BMP ternyata telah mengalami perubahan. Namun jika dikritisi lebih jauh, kajian Daulay ini juga menegaskan bahwa aset ekonomi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika tidak dibarengi dengan peningkatan pengetahuan yang memadai. Lebih jauh, Rajab (2006) yang mengkritisi tulisan Daulay menjelaskan bahwa kajian Daulay tidak meletakkan masalah kemiskinan sebagai faktor yang dominan dalam fenomena yang diteliti. Karena pola relasi gender sejauhmana itu timpang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kebudayaan, etnik, tingkat pendidikan, agama dan kelas sosial ekonomi. Dengan kata lain, bahwa pencarian nafkah yang dilakukan perempuan-perempuan miskin bukan merupakan pantulan atau refleksi dari perubahan ideologi patriarkhi patriarkhi dan memudarnya ketimpangan gender. Pada titik inilah kajian yang melihat bahwa mobilitas BMP yang diikuti kenaikan pendapatan akan serta merta merubah relasi gender dan *bargaining positionnya* nampaknya harus dikritisi lebih jauh.

Memang, secara konseptual sumberdaya merupakan konsep yang sangat penting dari teori konflik. Marx dan Engels memandang sumberdaya menjadi dasar bagi "kontrol alat produksi" dan mereka memfokuskan pada ekonomi material. Dalam konteks ini terdapat perdebatan mengenai hubungan antara kekuasaan, sumberdaya dan otoritas. Selain sumberdaya konsep lain yang penting dari teori konflik adalah struktur, negosiasi (siapa mendapatkan apa dengan modal sumberdaya yang dimilikinya) dan konsensus (*outcome* negosiasi) (Klein & White, 1996). Namun dari berbagai kajian di atas,

nampaknya teori Marxis tidak terlalu cukup memadai untuk menjelaskan persoalan yang dialami BMP. Pada titik inilah nampaknya perlu dikembangkan varian teori konflik yang lain yaitu dekonstruksionis. Dekonstruksisme dialektis sangat jelas identik dengan karya French scholar Jacques Derrida (1976). Fokus utama Derrida menggunakan menggunakan metode "dialektis" dalam menginterpretasikan materi teks dan dalam hal ini ia cenderung pada pengembangan hermeneutik. Ia menyandarkan pada dua jenis pembacaan teks. *Pertama*, pembacaan yang "mengkonstruksi" penafsiran sehari-hari pada teks. *Kedua* adalah pembacaan yang "mendekonstruksi" atau mengkritisi semua asumsi-asumsi yang dibangun dalam inti bacaan. Dibelakang pemikiran cara ini adalah suatu bentuk antifoundationalism/anti kemapanan yang radikal.

Dekonstruksisme sering dihubungkan pada postmodernisme. Postmodernisme berhubungan langsung pada Jean-Francois Lyotard dan publikasi "The Postmodern Condition in 1979". Dalam hal ini Lyotard berkesimpulan bahwa pengetahuan datang dari pembaharuan rasionalisme. Perspektif ini melihat, bahwa klaim "legitimasi", klaim ilmu sebagai objektif atau klaim demokrasi sebagai setara dan bebas. Dalam kenyataan hingga dewasa ini belum ada penggunaan pendekatan dekonstruksi untuk studi keluarga. Namun melihat makin tidak memadainya teori-teori yang ada, pengembangan teori-teori baru dalam memahami persoalan keluarga mutlak diperlukan.

#### E. Kesimpulan dan Catatan Kritis

Perspektif teori konflik, menekankan kajian keluarga pada level individu dan sistem sosial. Lebih jauh teori dijelaskan bahwa konflik antara kelompok didasarkan pada alokasi sumberdaya dan struktur sosial yang kompetitif. Alokasi sumberdaya tidak semuanya *equal* dan itu tidak berarti alokasi sumberdaya berlangsung secara tidak *fair*. Bahwa konflik dalam kelompok (seperti keluarga) berkaitan dengan ketimpangan sumberdaya antar individu. Alokasi sumberdaya berbeda dalam sistem sosial yang seringkali didasarkan pada status keanggotaan dalam kelompok, umur dan gender. Sebagai hasilnya adalah terdapat perbedaan sumberdaya dalam keluarga, juga beberapa anggota mempunyai sumberdaya lebih dari anggota lainnya.

Dalam konteks relasi gender dalam keluarga BMP, nampak bahwa teori konflik yang menekankan penguasaan sumberdaya untuk melakukan

realisasi yang equal tidak sepenuhnya berlaku. Relasi gender dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kebudayaan, etnik, tingkat pendidikan, agama dan kelas sosial ekonomi. Peningkatan pendapatan istri yang menjadi BMP ternyata tidak berimplikasi dan merefleksikan relasi gender yang setara. Pada titik inilah kajian kritis terhadap teori konflik dalam keluarga menjadi urgen dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Tri Marhaeni Puji 2005 *Redefinisi Eksistensi Perempuan Migran: Kasus Migran Kembali di Godong, Grobogan Jawa Tengah*, Disertasi Antropologi UGM Yogya, tidak diterbitkan
- Blood Jr, Robert O. 1972. *The Family*. New York: The Free Press.
- Goode, William J. 1964. *The Family*. New Jersey: Prentice Hall. Inc.
- Hutter, Mark. 1981. *The Changing Family. Comparative Perspectives*. New York: John Wiley & Sons.
- Klein, D. & White, J. 1996. *Family Theories: An Introduction*. Thousand Oaks CA: sage Publications.
- Newman, David M & Grauerholz, Liz. 2002. *Sociology of Families*. Thousand Oaks : Pine Forge Press.
- Milkman, Ruth & Townsley, Eleanor. 1994. Gender and The Economy. dalam Smelser, N.J & Swedberd, R. (Ed.) 1994. *The Handbook of Economic Sociology*. New Jersey: Princeton University Press.
- Morgan. 1975. *Social Theory and the Family*. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
- Sri Wahyuni, Ekawati. 2002. *Population Mobility in Central Java Province*. Bogor: Mimbar Sosek Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian IPB.
- Tukiran & Ediasuti, Endang. 2004. Penduduk Indonesia Saat Ini dan Tantangan di Masa Mendatang. dalam Faturochman dkk. (ed.). *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Wilson, Adrian. 1985. *Family*. London: Tavistock Publication.

- Bryant, John 2005 *Children Of International Migrants In Indonesia, Thailand, And The Philippines A Review Of Evidence And Policies* Innocenti Working Paper 2005-05
- Bank Dunia 2006 diakses dari [http://www.siteresources.worldbank.org/INT/INDONESIA/Resources/fact\\_sheet/migran\\_workers](http://www.siteresources.worldbank.org/INT/INDONESIA/Resources/fact_sheet/migran_workers) januari 2006
- Caldwell, J.C. 1969 *African Rural-Urban Migration: The Movements to Ghana's Town*, ANU Press Canberra
- Chant, S. and S. Radcliffe 1992 "Migration and Development: The Importance of Gender". In: *Gender and Migration in Developing Countries*. Ed. S. Chant. London and New York: Bellhaven Press.
- Daulay Harmona, 2001 *Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran; Studi Kasus di Kecamatan Rawamerta , Kabupaten Karawang, Jawa Barat*, Galang Press Yogyakarta
- Fariani Gina, 2001 *Analisis Gender dalam Fenomena Migrasi Internasional tenaga Kerja Indonesia Wanita ke Saudi Arabia: Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur, Jawa Barat* Skripsi S1 tidak diterbitkan , IPB Bogor
- Hatmadji, Sri Harijati 2004 *Profil Tenaga Kerja Migran Indonesia: Beberapa Karakteristik dan Permasalahannya*, *Warta demografi Tahun 34, No.1* 2004
- Hugo, Graeme, 1995 *International Labor Migration and Family : Some Observation from Indonesia*, *Asian and Pacific Migration Journal* 4(2-3)
- , 1997 *Undocumented International Migration: An Increasing Global Trend*, Adelaide. The University of Adelaide
- Kolopaking, Lala 2000 *Penghijrahan Buruh ke Malaysia dari Sisi Pembangunan Daerah Asal di Jawa*, *Jurnal Sosek Faperta IPB No 1* April 2001
- Kustini, 2002 *Perceraian di Kalangan Buruh Migran Perempuan : Studi Kasus di Desa Kadapura Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*, Thesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Migration Information Source 2003 (<http://www.migrationinformation.org/feature/display.id>)
- Masduki, Teten 1998 *Pokok-Pokok Pikiran YLBHI tentang Reformasi Politik Perburuhan Nasional*, YLBHI Jakarta
- Mantra , Ida Bagoes 1995 *Mobilitas Penduduk Non Permanen dan Pembangunan Daerah Asal*, Makalah Seminar Bangga Suka Desa, Yogyakarta 6 Juni

- da Bagoes 1999 *Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia: Isu Kemanusiaan dan Masalah Kebijakan* (Kasus di NTT, NTB dan Bawean Jawa Timur) Laporan Penelitian PSKK UGM
- Mantra, Ida Bagoes, Kasto dan Yeremias Keban 1998 *Migrasi Tenaga Kerja Malaysia: Determinan, Dampak dan Kebijakan* Laporan Penelitian Hibah Bersaing VII Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 1997/1998. Yogyakarta PPK UGM
- Murdiyanto, Eko 2001 *Remitan Migran Sirkuler dan Gejala Perubahan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa (Kasus di Dusun Trukun, Desa Nglegi Kecamatan Patuk Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Thesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Martin, Susan Forbes 2003 *Women and Migration, Consultative Meeting on Migration and Mobility and How This Movement Affects Women* United Nations Division for the Advancement of Women 2-4 December 2003
- Rajab, Budi 2006 *Migrasi dan Relasi Gender pada Rumah Tangga Miskin*, dalam Jurnal Perempuan No. 46 2006
- Setiadi, 1999 ' *Konteks Sosio-Kultural Migrasi Internasional: Kasus Lewotolok, Flores Timur* Populasi, 10(2)
- 2004 *Migrasi Perempuan: Respons Lokal dan Alternatif Kebijakan* dalam Faturohman, Bambang Wicaksono, Setiadi, Syahbudin Latief (ed) *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Yogya.
- Sukamdi dan Setiadi .2002 *Is International Migration a Way of Economic Crisis?* Populasi 13(2):61-78
- Sukamdi, et al 2001 *Female Labour Migration in South East Asia: Change and Continuity. Indonesia, Philippines, Thailand and Yunnan (China)*: PPK UGM and Asia Pacific Migration Research Network
- Tamtiari, Wini 1999 *Dampak Sosial Migrasi Tenaga Kerja ke Malaysia*, Populasi 10(2)
- , 2000 *Dampak Migrasi Tenaga Kerja ke Malaysia (Studi kasus implementasi Kebijakan Migrasi di Lombok Timur, NTB)* Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Negara, PPS UGM Yogyakarta